RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

AKD: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Bulan: Januari 2025

Oleh: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887
Fax : (021) 5715846
e-mail: perpustakaan@dpr.go.id
Web: perpustakaan.dpr.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disahkan dan mulai berlaku pada 31 Oktober 2023, menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam konteks fungsi legislasi, Komisi II DPR RI mengusulkan perubahan setelah menyoroti adanya kontradiksi yang dihadapi ASN. Salah satu fokusan yang dipertimbangkan dalam perubahan UU Nomor 20 Tahun 2023 adalah penempatan pejabat eselon II yang lebih fleksibel, yaitu dengan mengubah status mereka menjadi pegawai pusat yang dapat dipindahkan secara lebih luas, tidak terbatas hanya pada wilayah tertentu. Perubahan status eselon II yang menjadi pegawai pusat juga memungkinkan adanya rotasi yang lebih adil antar daerah. Hal ini memberikan kesempatan bagi pejabat untuk memperoleh pengalaman yang lebih luas dan memahami tantangan yang dihadapi berbagai daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara merata di seluruh Indonesia. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa pemerintahan daerah berjalan dengan baik, tanpa tergantung pada politik lokal yang kadang mengekang potensi kinerja birokrasi. Selain itu, penguatan netralitas ASN dapat mengurangi potensi penggunaan kekuasaan birokrasi oleh pejabat-pejabat yang lebih condong pada kepentingan politik tertentu, yang sering kali mengabaikan tujuan utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang berkualitas. Penguatan netralitas ASN tidak hanya bergantung pada perubahan struktur organisasi, tetapi juga pada upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas individu ASN itu sendiri. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan memperkuat sistem merit dalam pengangkatan dan promosi ASN, yang berbasis pada kompetensi dan bukan pada kedekatan politik.

Sumber:

https://emedia.dpr.go.id/2024/11/19/komisi-ii-dpr-ri-akan-usulkan-revisi-uu-asn/

https://www.kompasiana.com/kebonpala74/6784eddb34777c52943dc142/menguatkan-netralitas-asn-dalam-revisi-uu-no-20-tahun-2

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	DPR usulkan revisi UU ASN masuk Prolegnas 2025 demi jaga netralitas	https://www.antaranews.com/ber \nita/4473849/dpr-usulkan-revisi \n-uu-asn-masuk-prolegnas-2025-d \nemi-jaga-netralitas
Berita	Hindari Duplikasi Tugas Lembaga, Perlu Ada Pemisahan Kewenangan Pengelolaan ASN	https://www.mkri.id/index.php? \npage=web.Berita&id=21955&menu= \n2
Berita	Ketua AAKI Nilai Revisi UU ASN adalah Kebutuhan Mendesak di Era Prabowo	https://www.tempo.co/politik/k \netua-aaki-nilai-revisi-uu-asn- \nadalah-kebutuhan-mendesak-di-e \nra-prabowo-1194405
Berita	Komisi II DPR: RUU ASN akan buat rotasi ASN Pemda seperti TNI-Polri	https://www.antaranews.com/ber \nita/4555714/komisi-ii-dpr-ruu- \nasn-akan-buat-rotasi-asn-pemda \n-seperti-tni-polri
Berita	Komisi II: ASN Eselon II ke Atas Jadi Pegawai Pusat, Bisa Dirotasi Secara Nasional	https://www.dpr.go.id/berita/d \netail/id/53479/t/Komisi%20II:% \n20ASN%20Eselon%20II%20ke%20Ata \ns%20Jadi%20Pegawai%20Pusat,%20 \nBisa%20Dirotasi%20Secara%20Nas \nional
Berita	Menguatkan Netralitas ASN dalam Revisi UU No. 20 Tahun 2023	https://www.netralnews.com/men \nguatkan-netralitas-asn-dalam-r \nevisi-uu-no-20-tahun-2023/dG9n \nN25RcXNYV0RFems5bnFuR1h5UT09
Berita	Revisi UU ASN Ditarget Rampung Tahun 2025, Penerapan Rotasi ASN Eselon II Siap Dilakukan	https://sokoguru.id/hukum/revi \nsi-uu-asn-ditarget-rampung-tah \nun-2025-penerapan-rotasi-asn-e \nselon-ii-siap-dilakukan
Dokumen	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Mendengar Keterangan Dpr Dan Presiden (Iii)	https://www.mkri.id/public/con \ntent/persidangan/risalah/11207 \n_Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%2 \n0121.PUU-XXII.2024%20tgl.%207% \n20November%202024.pdf
Dokumen	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Mendengar Keterangan Pemberi Keterangan Yang Dihadirkan Oleh Mahkamah Dan Ahli Pemohon (V)	https://www.mkri.id/public/con \ntent/persidangan/risalah/11310 \n_Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%2 \n0121.PUU-XXII.2024%20tgl.%2013 \n%20Desember%202024.pdf
Dokumen	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Mendengar Keterangan Presiden Dan Pemberi Keterangan Yang Dihadirkan Oleh Mahkamah (Iv)	https://www.mkri.id/public/con \ntent/persidangan/risalah/11271 \n_Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%2 \n0121.PUU-XXII.2024%20tgl.%203% \n20Desember%202024.pdf
Dokumen	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pemeriksaan Pendahuluan (I)	https://www.mkri.id/public/con \ntent/persidangan/risalah/11075 \n_Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%2 \n0121.PUU-XXII.2024%20tgl.%2019 \n%20September%202024.pdf
Dokumen	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Perbaikan Permohonan (Ii)	https://www.mkri.id/public/con \ntent/persidangan/risalah/11108 \n_Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%2 \n0121.PUU-XXII.2024%20tgl.%203% \n20Oktober%202024.pdf
Undang-undang & Peraturan	Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	https://peraturan.bpk.go.id/De \ntails/269470/uu-no-20-tahun-20 \n23
Surat kabar	Komisi II Soroti Netralitas ASN	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/kliping/index/detail/id/46376